UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Disertasi ini berjudul : *Konflik Pertanahan di Propinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Persoalan konflik tanah menempati urutan pertama di Propinsi Riau, hampir seluruh kabupaten/kota di Propinsi Riau, muncul kasus konflik tanah ke permukaan, bahkan telah menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, seperti kasus Ampaian Rotan, Penyerobotan tanah Suku Sakai di Minas dan Duri, Penyerobotan Tanah Ulayat Sinama Nenek, penyerobotan lahan masyarakat Pulau Padang. Masyarakat amat aktif melakukan perlawanan atas permasalahan yang mereka identifikasi sebagai perlawanan untuk mengembalikan hak-hak pertanahan mereka. Perlawanan terus dilakukan melalui gerakan kultural, penguatan identitas kepompok , melakukan aksi demonstrasi sampai menyelesaikan persoalan tersebut di pengadilan. Tetapi usaha perjuangan itu selalu berakhir dengan kegagalan dan kekalahan untuk mengembalikan kepemilikan pertanahan mereka. Oleh karena itu perlu kajian lebih dalam lagi tentang konflik yang terjadi dengan melihat hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah penelitian.

Paling tidak ada tiga permasalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini. (1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Propinsi Riau? (2) Bagaimana solusi konflik pertanahan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ? (3) Bagaimana pendekatan hukum Islam dalam melihat akar dan penyelesaian konflik pertanahan di Propinsi Riau?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Propinsi Riau. (2) Untuk mencari solusi konflik tanah yang dilakukan oleh para pihak; bagaimana bentuk akhir solusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. (3)Untuk mencari alternatif pendekatan hukum Islam untuk melihat akar dan penyelesaian konflik pertanahan di Riau.

Adapun manfaat penelitian adalah, (1) Penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya konflik.(2) Dengan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui hal-haknya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. (3) Hasil penelitian ini akan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan.

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Adapun Untuk lebih memudahkan, hasil penelitian yang akan disajikan dalam pemaparan ini meliputi kasus dan penyebab konlik dan solusi yang dilakukan, serta mencari alternatif pendekatan hukum Islam untuk melihat akar dan penyelesaian konflik pertanahan di Riau.

Sumber data penelitian ini berasal dari kasus-kasus di daerah yang menonjol konflik pertanahannya di Propinsi Riau, termasuk pula, pengaduan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan, yang menjadi masukan penting dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga menggunakan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan sebagian data diakses melalui internet. Browsing internet dilakukan pada saat dibutuhkan. Metode pencatatan yang digunakan dalam studi ini adalah bahwa satu jenis konflik antara satu perusahaan dengan masyarakat dihitung sebagai satu kali konflik meskipun konflik tersebut terjadi berulang-ulang. Adapun Tehnik Pengumpulan dilakukan melalui, Wawancara, Obsevasi, Dokumen. Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam data kuantitatif dan kualitatif, dan akan diolah melalui cara-caranya masing-masing. Tehnik Analisa Data kuantitatif akan dilakukan mempergunakan metode statistik sederhana, yang tertuang dalam bentuk tabel dan Data yang bersifat kualitatif akan dihubungkan antara satu dan yang lainnya dan akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dan akan menyatu dalam laporan penelitian disertasi.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menggunakan seluruh atau sebagian isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah pengumpulan data dan mengolah serta melakukan analisa Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adapun bentuk Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam propinsi Riau dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok pisik di lapangan baik antara masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian pada masing-pihak yang bertikai.
2. Kasus resolusi konflik lahan selama 2013 belum banyak yang diselesaikan kalaupun tidak terdengar masyarakat menyuarakan tentang konflik hal itu lebih disebabkan tidak jelasnya agenda penyelesaian konflik pertenahan di Riau dan persoalan itu pertanahan di Riau dan persoalan itu dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila dibenarkan mendahului untuk menarik sebuah ungkapan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2013 adalah absennya agenda penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah yang jelas tentang pola penyelesaian konflik lahan. Beberapa kasus yang terjadi di Riau memperlihatkan bahwa negara absen (setidaknya setengah absen) dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau. Agenda penyelesaian konflik pertanahan itu baru bahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa. Alasan yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah Propinsi Riau adalah kewenangan penangan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diupayakan melalui : a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum.
3. Hukum Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan.Pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cara damai *(maslahat)* dan tidak menimbulkan kerusakan *(madarat)*. Seluruh strategi yang digunakan oleh warga untuk menyelesaikan masalahnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Terhadap Tanah masyarakat yang diserobot oleh perusahaan negara maupun oleh perusahaan swasta adalah bertentangan dengan hukum Islam dan harus dikembalikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan karena masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dengan tanahnya, apa lagi dicarikan di tempat lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

هذه الأطروحة تتعلق بالموضوع : الصراع على الأراضي في مقاطعة رياو وتنفيذه دراسة تعليلية من منظور الشريعة الإسلامية

وتنشأ مشكلة الصراعات الأراضي في المقام الأول في محافظة رياو، وجميع المحافظات / البلديات تقريبا في محافظة رياو، وتنشأ مشاكل النزاعات على الأراضي، مما تسبب في أعمال شغب تسببت في وقوع إصابات، مثل حالة راتان أمبايان وساكاي لاند أكيسيتيون في ميناس ودوري، خطف ولاية ولايات من سيناما غرانما، الاستيلاء على الأراضي من المجتمع بولاو بادانغ.المجتمع نشيطة جدا ضد المشاكل التي تعرف بأنها مقاومة لاستعادة حقوقهم عن أراضهم وتستمر المقاومة من خلال الحركات الثقافية، وتعزيز هوية الجماعة، وإجراء مظاهرات لحل القضية في المحكمة. ولكن نتيجتها ينتهي دائما بالفشل والهزيمة لاستعادة ملكيتهم لأراضيهم. ولذلك فمن الضرورة دراسة أكثر عمقا حول الصراع الذي حدث من خلال النظر في القانون المنطبق على المجتمع المعني في الدراسة.

هناك ثلاث قضايا رئيسية على الأقل يجب الإجابة عليها في هذه الدراسة. (١) ما هي العوامل المسببة للصراع على الأراضي في مقاطعة رياو؟ (٢) كيف يتم حل النزاع على الأراضي من قبل أطراف النزاع؟ (٣) ما هو نهج الشريعة الإسلامية في النظر في جذور وتسوية النزاعات على الأراضي في مقاطعة رياو؟
والغرض من هذا البحث هو: (١) معرفة العوامل المسببة للصراع على الأراضي في مقاطعة رياو. (٢) إيجاد حلول للصراعات على الأراضي من جانب الأطراف؛ كيف يقوم الطرفان بالشكل النهائي لحل النزاع. (٣) البحث عن نهج بديلة للشريعة الإسلامية لرؤية جذور وتسوية النزاعات على الأراضي في رياو.

فوائد البحث هي (١)، وسوف تكون البحوث مفيدة لتطوير العلم بحيث يمكن معرفة العوامل المسببة للصراع. (٢) مع هذا البحث سوف تكون مفيدة للمجتمع لمعرفة حقوقه في الإدارة والاستخدام. (٣) ستكون نتائج هذه الدراسة مرجعا للحكومة في اتخاذ سياسة للتغلب على النزاعات على الأراضي

وقد أجري هذا البحث في مقاطعة رياو موزعة على 12 منطقة / مدينة. أما أكثر سهولة، فإن نتائج البحث التي ستعرض في هذا العرض تشمل حالات وأسباب الصراع والحلول التي تم إجراؤها، وكذلك البحث عن نهج بديلة للشريعة الإسلامية لرؤية جذور وتسوية النزاعات على الأراضي في رياو.

ويركز مصدر هذه البيانات البحثية على الحالات في المناطق التي تبرز للصراعات على الأراضي في مقاطعة رياو. وبالمثل، فإن الشكاوى العامة تتعارض مع الشركة التي أصبحت مدخلا هاما في هذه الدراسة. ناهيك عن أن هذا البحث يستخدم أيضا وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات. يتم اختيار وسائل الإعلام كمصدر للبيانات لأنه يمكن الحصول عليها بسهولة وبسرعة؛ حتى بعض البيانات التي تم الوصول إليها عبر الإنترنت. يتم تصفح الإنترنت عند الحاجة. طريقة التسجيل المستخدمة في هذه الدراسة هي أن نوع واحد من الصراع بين شركة واحدة والمجتمع هو عد النزاع مرة واحدة على الرغم من أن الصراع يحدث مرارا وتكرارا

تتم تقنية جمع من خلال، مقابلة، الضحى، وثيقة.

التقنية تتم معالجة البيانات من خلال تجميع البيانات الكمية والنوعية، وسيتم معالجتها من خلال طرق كل منها. داتاكوانتيتاتيف تقنية التحليل سيتم القيام به باستخدام طريقة إحصائية بسيطة، والتي ترد في شكل جداول والبيانات التي سيتم ربط نوعي بين واحد والآخر، وأخيرا سيتم استخلاص استنتاج وسوف تكون موحدة في تقرير بحثي والأطروحة.

وفيما يلي نتائج هذه الدراسة:

(١) شكل النزاع الذي يحدث في محافظة رياو، خاصة فيما يتعلق بالنزاع على الأراضي بين الشركة وغيرها من الشركات، وبين الشركة والمجتمع، وبين مجتمع الشركات والقانون العرفي (ولاية الأولوية). وتحدث هذه الصراعات بسبب القضايا البيئية وقضايا انتزاع الأراضي المجتمعية وقضايا تداخل الأراضي وتشمل النزاعات الحدودية بين المناطق الحضرية داخل مقاطعة رياو والحدود الإقليمية مع المقاطعات المجاورة، فضلا عن القضايا البيئية التي تعزى جميعها إلى انتهاكات إجرائية ولا تتبع القواعد في تحقيقها في الميدان. وقد تسببت المشكلة حتى في صراع مادي في الميدان سواء بين المجتمع والشركة وأدى إلى ضرر للأطراف المتصارعة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengcopy sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(٢) ولم يتم حتى الآن حل قضية حل النزاعات على الأراضي في عام 2013، حتى لو لم يسمع المجتمع المحلي الحديث عن النزاع، وهو سببه عدم وضوح جدول أعمال تسوية الصراع في رياو والمشكلة هي أرض في رياو ويمكن توسيع نطاق المشكلة على النحو المنشود. ومع ذلك، إذا كان هناك ما يبرر أن يسبق رسم عبارة عن نمط حل نزاع الأراضي خالل عام 2013، فإن غياب جدول أعمال حل الأراضي في رياو، لذلك ال يوجد اتجاه واضح لنمط النزاعات على الأراضي. وأظهرت العديد من الحالات التي وقعت في رياو أن الدولة الغائبة (على الأقل نصف غائبة) في تسوية المنازعات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية في رياو.أجندا حل النزاع على الأراضي تمت مناقشتها أو حلها فقط إذا كان طلب إعادة الظهور من المجتمع أو إذا كان هناك تجمع. والسبب الذي يعبر عنه دائما في المقام الأول من قبل حكومة مقاطعة رياو هو سلطة التعامل مع الصراعات على الأراضي المزيد من السلطة في مدينة حكومة المقاطعة.يمكن رؤية حالات النزاعات على الأراضي التي تحدث في مقاطعة رياو الحلول المتخذة لحلها من خلال: أ. المداولات. ب. الوساطة؛ ج. المسار القانوني

(٣) يعترف القانون الإسلامي بنموذجين في تسوية المنازعات هما نموذج التقاضي وعدم التقاضي. ونموذج التقاضي هو وجهة نظر أساسية ويعتقد أن المؤسسة المناسبة الوحيدة لحل النزاعات هي من خلال المحاكم. وعلى النقيض من ذلك، ينبثق نموذج عدم التقاضي من الافتراض الأساسي بأن تسوية المنازعات لا يجب أن تمر بالقانون والمحاكم. الطرق خارج المحكمة أكثر فعالية بكثير في حل النزاعات دون ترك الجروح على قلب الخصم. إن روح الإسلام تشير إلى أن حل النزاع يجب أن يتم بطرق خارج المحكمة، ويجب تنفيذ الإستراتيجية بطريقة سلمية وغير مدمرة. إن الاستراتيجية الكاملة التي يستخدمها المواطنون لحل المشكلة ليست ضد مبدأ الشريعة الإسلامية. ضد أرض الناس الذين يتم انتزاعهم من قبل مؤسسة الدولة أو من قبل شركة خاصة يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويجب إعادتهم إلى المجتمع المعني. إن تسوية الحكومة لن تحل المشكلة لأن المجتمع لا يمكن فصله عن الأرض، وما يتم البحث عنه في أي مكان آخر.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
1. Penggunaan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

The dissertation is entitled: Land Conflict in Riau Province In Islamic Law Perspective.

Land conflicts ranks first in Riau Province, almost all districts / cities in Riau Province, problems of land conflicts arise, has caused a riot causing casualties, such as the case of Rattan Ampaian, Sakai Land Acquisition in Minas and Duri, Snatching of Ancestral Land Sinama Granny, land grabbing community of Pulau Padang. The community is very active against the problems they identify as resistance to restore their land rights. Resistance continues through cultural movements, strengthening group identity, conduct demonstrations to resolve the issue in court. But the struggle always ends with failure and defeat to restore their land ownership. Therefore it is necessary to study more deeply about the conflict that occurred by looking at the law applicable to the community in question in a study.

There are at least three major issues to be answered in this study. (1) What are the factors causing land conflict in Riau Province? (2) How is the land conflict solution done by the parties to the dispute? (3) What is the approach of Islamic law in looking at the roots and settlement of land conflicts in Riau Province?

The purpose of this study are: (1) To know the factors causing land conflict in Riau Province. (2) To find solutions to land conflicts by the parties; how the final form of conflict solution is done by both parties. (3) To look for alternative approaches of Islamic law to see the roots and settlement of land conflicts in Riau.

The research benefits are, (1) Research will be useful for the development of science so that can know the factors causing the conflict. (2) With this research will be useful for the community to know its rights in the management and utilization. (3) The results of this study will be a reference for the government in taking policy in overcoming land conflicts.

This research was conducted in Riau Province spread in 12 districts / cities. As for more ease, the results of the research to be presented in this presentation include the cases and causes of the conflict and the solutions undertaken, as well as seeking alternative approaches to Islamic law to see the roots and settlement of land conflicts in Riau.

The source of this research data is focused on cases in areas that stands out for land conflicts in Riau Province. Similarly, public complaints are in conflict with the company that became an important input in this study. Not to mention that, this research also utilizes mass media as source of information. Mass media is chosen as a source of data because it can be obtained easily and quickly; even some of the data accessed via the internet. Internet browsing is done when needed. The method of recording used in this study is that one type of conflict between one company and the community is counted as a one-off conflict even though the conflict occurs repeatedly.

The Collection Technique is done through, Interview, Observation, Document.

Technique Data processing is done by grouping quantitative and qualitative data, and will be processed through the ways of each. Quantitative Data Analysis Techniques will be conducted using simple statistical methods, contained in the form of tables and data that are qualitative will be linked between one and the other and eventually will be drawn a conclusion and will be united in the dissertation research report.

The results of this study are as follows:

1. The form of conflict that occurred in the province of Riau, especially related to land land conflicts occur between companies with other companies, between companies and communities, and between companies and indigenous and tribal peoples (ulayat lands). These conflicts occur because they are triggered by environmental issues, the issue of

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

community land grabs, overlapping issues of land and including boundary conflicts between urban districts within the province of Riau and provincial boundaries with neighboring provinces, as well as environmental issues are all due to the procedures that are violated and do not follow the rules in the realization in the field. The problem has even brought physical clashes in the field both between the community and the company and has brought harm to the conflicting parties.

2. The case of land conflict resolution in 2013 has not been solved yet, even if it is not heard by the community to speak about the conflict. It is caused by the unclear agenda of settling the conflict in Riau and the problem is land in Riau and the problem can be extended as desired. However, if it is justified to precede drawing a phrase about the pattern of land conflict resolution during 2013 is the absence of a land conflict resolution agenda in Riau, so there is no clear direction on the pattern of land conflicts. Some cases in Riau show that the state is absent (at least half absent) in dispute resolution related to the management of Natural Resources in Riau. The land conflict resolution agenda is only discussed or resolved when another request comes from the community or when there is a demonstration. The reason that is always expressed primarily by the Government of Riau Province is the authority of handling more land conflicts of authority on the Municipal Government. By looking at cases of land conflicts that occurred in Riau Province solutions taken to resolve them can be pursued through: a. Discussion; b. Mediation; c. The legal path.
3. Islamic law recognizes two paradigms in the settlement of disputes namely the paradigm of litigation and non-litigation. The litigation paradigm is a fundamental view and belief that the only appropriate institution to resolve disputes is through the courts. In contrast, the non-litigation paradigm departs from the basic assumption that dispute resolution does not have to go through law and the courts. The ways out of court are much more effective at resolving disputes without leaving wounds on the opponent's heart. The spirit of Islam indicates that dispute resolution should be conducted in ways outside the court. Implementation of the strategy must be done in a peaceful and non-destructive way (madarat). The whole strategy used by citizens to solve the problem is not against the principle of Islamic law. Against the Land of the people who are snatched by the state enterprise or by a private company is contrary to Islamic law and must be returned to the community concerned. The settlement by the government will not solve the problem because the community can not be separated with the land, what else is searched elsewhere.

UIN SUSKA RIAU
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
m Riau

ilik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ndang-Undang

ebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.